

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- A.P. Parlindungan. (1990). *Konversi Hak-Hak Atas Tanah* (2nd ed.). Mandar Maju.
- Asikin, Z. (2021). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Auri. (2014). *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*. 2, 10.
- Bachtiar Effendie. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya* (2nd ed.). Alumni.
- Benhard Limbong. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan*
- Budi, H. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Djambatan).
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan* (1st ed.). Prestasi Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ke e). Gramedia pustaka utama.
- G. Kartasapoetra. (1986). *Masalah Pertanahan di Indonesia* (1st ed.). PT.Bina Aksara.
- Hanitijo Ronny Soemitro. (1991). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harsono Boedi. (2008). *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan.
- Hermit Herman. (2004). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik*. C.V.Mandar Maju.
- IGN. G. Susila. (2014). *Kejahatan Sertifikat Tanah Ganda Dalam Perspektif Modus, Akibat Hukum, dan Solusi Kritis Penyelesaian Masalah*. UB Press.
- Imam soetikno. (1994). *Politik Agraria Nasional* (3rd ed.). Gadjah Mada University.
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar*
- Kartini Muljadi, G. widjaja. (2005). *Hak-hak Atas Tanah*.

- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Mhd. Yamin Lubis, A. R. L. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah* (revisi). Mandar Maju.
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Republik Indonesia. (2004). Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1, 1–5*.
- Ruchiyat, E. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA* (2nd ed.). Armico.
- Rusmadi, M. (1997). *Administrasi Pertanahan* (Edisi 1).
- Salim HS. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Samun Ismaya. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Soedharyo Soimin. (2001). *Status Hak dan Pembebasan Tanah* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Soemitro Hanitijo Ronny. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.Sinar Grafika.
- Srikuntjoro. (n.d.). *Sertifikat Ganda*. Sinar Grafika.
- Tehupeiory Aartjie. (2021). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Penebar Swadaya Grup.
- Ulfia Hasanah. (1997). STATUS KEPEMILIKAN TANAH HASIL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. *Icassp*, 3, 295–316.
- Urip Santoso. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana

Prenadamedia Group.

Usman, R. (2018). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.

Yamin Lubis. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah* (3rd ed.). Mandar Maju.

Zulhadji, A. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, 5(4), 31–35.

## **B. Peratutan Perundang-undangan**

Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945* (Vol. 4, Nomor 1, hal. 1–12).

Republik Indonesia. (2004). Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1*, 1–5.

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

## **C. Sumber Lain**

Ginting, S. I., & Idham, I. (2021). Perlindungan Hukum Untuk Pemegang Hak Atas Tanah Dengan Kasus Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(2), 188-202.

Glosarium. (2014). *Pengertian Perlindungan Para Ahli*. 13 April 2014.

HARAHAP, F. A. *Akibat Hukum Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Bersifat Ganda* (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan).

Ismail, I. (2011). Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(53), 23–34.

Lutfiyansyah, A. M. (2021). *Akibat Hukum Dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Ganda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).

Office, S. B. L. (2020). *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*. 10 Desember 2020.

Office, S. B. L. (2020). *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*. 10 Desember 2020.

Pendaftaran Tanah. In *Icassp* (Vol. 21, Issue 3, pp. 295–316).

*Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase*. Visimedia.

- PUTRI, A., Turatmiyah, S., & Putri, V. R. (2016). *AKIBAT HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT GANDA YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI PADA BPN KOTA PALEMBANG)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT/2019/PT. BDG). *JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI*, 6(2), 238-247.
- Waani Debora, E. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Serifikat Tanah Yang Di Keluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Badan Pertanahan Nasional)*. VI(2), 5–11.
- Waani Debora, E. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Serifikat Tanah Yang Di Keluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Badan Pertanahan Nasional)*. VI(2), 5–11.